



Menumbuhkembangkan UMKM di Indonesia: Analisis Faktor Pendukung Inklusi Keuangan

Muthia Ulfah

FEBI UIN Imam Bonjol Padang

muthiaulfah@uinib.ac.id

ABSTRACT

Financial inclusion can be an alternative to breaking the chain of poverty by supplying access to business capital financing to improve the welfare of underprivileged people who have had difficulty getting financial services from formal financial institutions. In other words, financial inclusion policies can develop new MSMEs, create job opportunities, reduce unemployment, and ultimately reduce poverty rates. Furthermore, financial inclusion can increase national income and inclusive economic growth. The aim of this research is to determine the supporting factors for financial inclusion in developing MSMEs. This research is a literature review research by collecting literature from Google Scholar. The content analysis is used for data analysis. This research found that there are 3 key factors supporting financial inclusion in developing MSMEs. These factors are financial literacy, financial technology, and empowerment. Financial literacy contributes to providing information to MSME regarding financial products as well as increasing the knowledge of MSME in financial management. Financial technology provides easy access for MSME to get the financial services. On the other hand, empowerment carried out by financial institutions that deliver microfinancing has an impact on the sustainability of MSMEs.

Key Word : *Financial Inclusion, MSMEs, Financial Literacy, Financial Technology, Empowerment.*

ABSTRAK

Inklusi keuangan dapat menjadi alternatif dalam memutus mata rantai kemiskinan dengan menyediakan akses pembiayaan modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan keuangan dari institusi keuangan formal. Artikel ini membahas kebijakan inklusi keuangan dapat menumbuhkembangkan UMKM baru, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan pada akhirnya mengurangi angka kemiskinan. Lebih jauh, inklusi keuangan mampu meningkatkan pendapatan nasional dan pertumbuhan perekonomian yang inklusif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali faktor-faktor penunjang inklusi keuangan dalam menumbuhkembangkan UMKM. Penelitian ini merupakan penelitian literature review dengan mengumpulkan literatur dari google scholar. Analisis data dilakukan melalui content analysis. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 3 faktor kunci pendukung inklusi keuangan dalam menumbuhkembangkan UMKM. Faktor tersebut

adalah literasi keuangan, teknologi keuangan, dan pemberdayaan. Literasi keuangan berkontribusi dalam memberikan informasi kepada pelaku UMKM terkait produk-produk keuangan serta meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangan. Teknologi keuangan memberikan kemudahan akses kepada pelaku UMKM dalam mendapatkan akses layanan keuangan. Di sisi lain, pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan mikro berpengaruh pada keberlanjutan UMKM

Kata Kunci: Inklusi Keuangan, UMKM, Literasi Keuangan, Teknologi Keuangan, Pemberdayaan.

PENDAHULUAN

Inklusi keuangan dipercaya sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan. Salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya akses masyarakat terhadap modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraannya dan keluar dari perangkap kemiskinan. Masyarakat miskin umumnya kesulitan mendapatkan layanan keuangan dari institusi formal yang menghendaki jaminan atas pinjaman yang diberikan. Tidak jarang masyarakat miskin justru terlibat dengan institusi keuangan non formal seperti rentenir yang kemudian menjerumuskan masyarakat tersebut pada jurang kemiskinan yang lebih dalam.

Inklusi keuangan memberikan kemudahan akses layanan keuangan pada masyarakat dengan menghilangkan berbagai hambatan harga ataupun non harga (Bank Indonesia, 2014). Tujuannya adalah menciptakan sebuah sistem keuangan yang bisa diakses semua kelompok masyarakat sehingga dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mengentaskan kemiskinan (Adriani & Wiksuana, 2018). Penerapan sistem keuangan yang inklusif akan mengurangi ketimpangan ekonomi dan tingkat kemiskinan (Holle, 2020). Kebijakan inklusi keuangan di Indonesia berdampak terhadap pengurangan kemiskinan dapat dilihat dari dimensi akses dan dimensi penggunaannya (Nabila & Rizki, 2018).

Hal ini karena inklusi keuangan membantu masyarakat miskin yang kesulitan dalam mengakses sumber modal untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, inklusi keuangan dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam banyak program pengentasan kemiskinan.

Selain itu, kebijakan inklusi keuangan memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Pertama, inklusi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nasional (Anwar & Amri, 2017). Kedua, kebijakan inklusi keuangan berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Adriani & Wiksuana, 2018; Nabila & Rizki, 2018). Ketiga, inklusi keuangan meningkatkan kestabilan keuangan dan mengurangi inflasi (Oanh et al., 2023). Oleh karena itu, diharapkan kepada lembaga keuangan, pemerintah, dan seluruh *stakeholders* yang terlibat agar dapat bekerja sama dalam mewujudkan sektor keuangan yang lebih inklusif di Indonesia.

Inklusi keuangan dalam praktiknya sudah berkembang sejak lama di Indonesia. Menurut Rafsanjani koperasi adalah lembaga yang menerapkan inklusi keuangan karena koperasi memberikan layanan keuangan dengan biaya yang terjangkau kepada masyarakat yang berpendapatan rendah dan cenderung tidak memiliki akses terhadap institusi keuangan lainnya (Rafsanjani, 2017). Merujuk pendapat ini, maka inklusi keuangan sudah ada sejak koperasi pertama berdiri di Indonesia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa inklusi keuangan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1895. Koperasi pertama berdiri di Leuwiliang pada tahun 1985. Ngabai Ariawiriaatmadja beserta rekan-rekannya membentuk semacam lembaga simpan-pinjam untuk membantu rekan sejawatnya serta pegawai pribumi agar terlepas dari belenggu tengkulak. (Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, n.d.). Selain itu, koperasi sebagai lembaga keuangan inklusif juga dapat dilihat dari karakteristiknya dimana layanan dan manfaat koperasi diupayakan semaksimal mungkin untuk menyejahterakan anggotanya. Anggota koperasi diantaranya adalah masyarakat desa, petani, nelayan, masyarakat miskin dan kelompok masyarakat rentan lainnya yang kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap bantuan permodalan. Hal ini sejalan dengan spirit inklusi keuangan, meskipun jangkauan koperasi sebagai lembaga keuangan mikro masih sangat terbatas.

Dari waktu ke waktu, inklusifitas keuangan terus meningkat di Indonesia. Artinya, akses masyarakat miskin, masyarakat pedesaan, atau masyarakat kurang beruntung lainnya terhadap jasa keuangan semakin membaik. Hasil SNLIK 2022 menyatakan bahwa indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 85,10%, naik dari tahun 2019 yang berjumlah 76,19% dimana inklusi keuangan paling tinggi ada pada sektor perbankan 74,03% (OJK, 2022a). Jika dibandingkan dengan inklusi keuangan pada lembaga keuangan konvensional, inklusi keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) jauh lebih rendah. Inklusi keuangan pada sektor keuangan syariah secara nasional baru mencapai 12,12% (OJK, 2022b). Hal ini dapat dimaklumi mengingat *market share* keuangan syariah secara nasional juga masih rendah, yaitu 10,69%. *Market share* perbankan syariah bahkan lebih rendah lagi, yaitu 7,09% (OJK, 2022b).

Sektor jasa keuangan yang termasuk dalam survei tersebut adalah perbankan, dana pensiun, perasuransian, lembaga pembiayaan, pergadaian, lembaga keuangan mikro, pasar modal, dan *financial technology*. Survei tersebut belum mencakup sektor keuangan sosial keagamaan seperti lembaga zakat, lembaga wakaf, BMT, dan lembaga keuangan sosial lainnya. Survei tersebut juga belum mencakup lembaga keuangan yang dibuat dalam program pemberdayaan masyarakat seperti BUMDes, UPK (Unit Pengelola Kegiatan) peninggalan program PNPM, dan lembaga keuangan non formal lainnya. Artinya, tingkat inklusi keuangan di Indonesia dalam prakteknya lebih besar lagi dari angka pada survei tersebut.

Peningkatan pendapatan nasional, pertumbuhan dan kestabilan ekonomi, serta penurunan angka kemiskinan, sebagaimana dipaparkan di atas, merupakan *multiplier effects* dari kebijakan inklusi keuangan. Menelisik lebih dalam, inklusi keuangan sebenarnya berdampak langsung terhadap UMKM, sedangkan hal-hal yang disebutkan di atas merupakan efek turunannya. Kemudahan akses layanan keuangan berarti meningkatkan kesempatan masyarakat dalam mendapatkan pembiayaan modal usaha. Hal ini dapat menumbuhkembangkan sektor UMKM. Kebijakan inklusi keuangan memberikan dorongan kepada lembaga keuangan agar menyediakan pembiayaan untuk modal usaha bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses terhadap modal usaha. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan UMKM baru (Adriani & Wiksuana, 2018). Pertumbuhan UMKM selanjutnya akan membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan.

Berbagai studi menyajikan landasan argumentatif dan sekaligus

memberikan bukti bahwa inklusi keuangan berdampak terhadap pengurangan angka kemiskinan dengan memperkuat sektor UMKM. Hal ini pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan nasional serta kestabilan ekonomi. Tentu saja, untuk mencapai kondisi tersebut ada sejumlah faktor yang menjadi pendukung suksesnya penerapan inklusi keuangan. Tujuan penelitian ini untuk menggali faktor-faktor yang mendukung peranan inklusi keuangan dalam menumbuhkembangkan sektor UMKM di Indonesia dari berbagai literatur yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Dalam studi kepustakaan, data dikumpulkan melalui proses mempelajari serta mengambil teori dari berbagai literatur yang ada (Sugiyono, 2007). Dari berbagai literatur yang relevan, data dikumpulkan, disajikan dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari google scholar dan website institusi resmi. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan *content analysis* untuk memperoleh pemaknaan yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mewujudkan keuangan yang inklusif menjadi salah satu program prioritas pemerintah di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Keuangan inklusif bagaimanapun telah menggeser paradigma pembangunan ekonomi yang sekedar mengejar angka pertumbuhan yang tinggi meskipun mengabaikan ketimpangan ekonomi yang ditimbulkan menuju pertumbuhan yang inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi

yang manfaatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Hal ini sesuai dengan prinsip keuangan inklusif yang memastikan tersedianya akses layanan finansial yang memadai, aman, serta dapat dijangkau oleh masyarakat kurang beruntung, termasuk masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah, tidak tercatat dan masyarakat yang hidup di perdesaan, yang tidak terlayani atau terabaikan institusi keuangan formal (Akyuwen & Waskito, 2018).

Inklusi keuangan memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini mendorong tumbuhnya UMKM baru. Selain itu, kebijakan keuangan inklusif juga mempermudah jangkauan UMKM mendapatkan suntikan modal dalam mengembangkan usahanya. Tidak hanya memperoleh modal, UMKM juga mendapat kemudahan pembayaran cicilan dan kelonggaran waktu apabila kendala terjadi (Laili & Kusumaningtias, 2020). Di samping itu, keuangan yang inklusif juga memberikan pengaruh positif yang signifikan pada kinerja UMKM (Ardyanfitri, 2023; Listiani et al., 2022; Maharani & Cipta, 2022; M. H. Yunus et al., 2022). Hal ini berarti suntikan modal yang diperoleh UMKM melalui program keuangan inklusif membantu UMKM dalam meningkatkan usaha serta pendapatannya.

Inklusi keuangan tidak hanya menumbuhkembangkan usaha mikro, namun juga mendorong keberlanjutan usaha tersebut. Inklusi keuangan memberikan pengaruh positif pada keberlangsungan UMKM (Idawati & Pratama, 2023; Listiani et al., 2022; Winda Yanti et al., 2022). Dalam arti kata lain, keuangan yang inklusif dapat meningkatkan ketahanan UMKM dalam menghadapi berbagai persoalan serta memastikan keberlanjutan usahanya. Lebih lanjut, keberadaan inklusi

keuangan dan ekosistem kewirausahaan saling melengkapi satu sama lain (Sharma et al., 2023) dalam artian bahwa inklusi keuangan membangun ekosistem kewirausahaan yang menumbuhkembangkan usaha mikro dan sebaliknya ekosistem kewirausahaan juga meningkatkan keuangan inklusif. Keduanya membangun simbiosis yang saling mendukung satu sama lain.

Dari 27 artikel tentang inklusi keuangan dalam kaitannya dengan pertumbuhan UMKM yang diterbitkan 5 tahun terakhir, penulis menemukan 3 faktor kunci yang memberikan kontribusi dalam mendorong keberhasilan inklusi keuangan dalam menumbuhkembangkan UMKM. Ketiga faktor tersebut adalah literasi keuangan, teknologi keuangan, dan pemberdayaan.

Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Inklusi Keuangan

1. Literasi keuangan

Faktor pertama yang mendukung keuangan inklusif ialah literasi keuangan. Literasi keuangan memberi pengaruh positif signifikan pada inklusi keuangan (Kusuma, 2020; Nainggolan, 2023; Susilawati & Puryandani, 2020). Semakin mudah dan luasnya akses informasi yang berkembang hari ini, mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pengetahuan mengenai layanan keuangan. Informasi yang disediakan lembaga keuangan melalui berbagai media yang ada berkontribusi dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan keuangan termasuk pembiayaan modal usaha. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai layanan keuangan menjadi sangat penting supaya

masyarakat bisa memanfaatkan jasa keuangan secara baik dan bijak.

Literasi keuangan berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan dan keyakinan individu terkait konsep keuangan sehingga dapat mengelola keuangannya secara tepat. (Mustofa, 2022). Tingkat literasi keuangan seseorang dapat dilihat pada sikap keuangannya serta kemampuannya dalam membuat perencanaan keuangan. Literasi keuangan membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengelola keuangannya dengan baik. Peningkatan pengetahuan keuangan masyarakat akan mendorong perilaku keuangan yang lebih baik lagi karena literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan pada perilaku keuangan (Anisyah et al., 2021). Artinya, semakin baik literasi keuangannya, maka seseorang akan semakin bijak dalam mengambil keputusan keuangannya.

Literasi keuangan berdampak positif pada UMKM dilihat dari 2 aspek. Pertama, literasi keuangan meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga meningkatkan akses mereka terhadap layanan keuangan. Hal ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap modal untuk membuka ataupun mengembangkan usahanya. Kedua, literasi keuangan membantu masyarakat agar semakin baik dalam mengelola keuangannya. Hal ini berkontribusi pada pengembangan usaha mereka. Sejumlah penelitian memberikan bukti literasi keuangan berkontribusi positif signifikan pada kinerja UMKM (Febriana & Sulhan, 2021; Idawati & Pratama, 2023; Sanistasya et al., 2019). Hal ini menegaskan bahwa literasi keuangan mendukung keuangan inklusif dalam menumbuhkembangkan UMKM.

2. Teknologi Keuangan

Salah satu aspek penting yang mendukung program inklusi keuangan adalah perkembangan teknologi keuangan (*financial technology* atau disingkat dengan *fintech*). Perkembangan pesat *fintech* mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan jasa keuangan kapanpun dan dimanapun tanpa perlu mengunjungi institusi keuangan secara fisik. Jenis-jenis *fintech* yang berkembang di Indonesia antara lain *digital payment system*, *fintech lending* atau *peer to peer lending*, *microfinancing*, dan *crowdfunding*.

Di antara jenis-jenis *fintech* yang ada, jenis yang paling banyak digunakan masyarakat adalah *fintech lending* atau lebih populer dengan sebutan pinjaman *online* yang menyediakan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan proses yang mudah dan cepat. Menurut data OJK per Oktober 2023, *fintech lending* yang telah mendapatkan izin OJK berjumlah 101 perusahaan (OJK, 2023). Selain yang berizin tersebut, terdapat juga sejumlah *fintech lending* ilegal yang beredar di masyarakat. Selain *fintech lending*, ada *fintech microfinancing* yang merupakan perusahaan teknologi keuangan yang memberikan pembiayaan mikro kepada UMKM. Dapat dikatakan perkembangan *fintech* ini turut mendorong inklusi keuangan terus meningkat. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa penggunaan *fintech* memiliki pengaruh positif signifikan pada inklusi keuangan (Ainiyah & Yuliana, 2022; Kerthayasa & Darmayanti, 2023).

Pembiayaan yang diberikan oleh *fintech* dapat dalam bentuk pembiayaan konsumtif maupun produktif. Pembiayaan konsumtif membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mendesaknya serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam jangka pendek. Sedangkan pembiayaan

produktif bertujuan untuk memberikan modal usaha bagi para pelaku usaha agar dapat meningkatkan kesejahteraannya dalam jangka panjang.

Selain meningkatkan inklusi keuangan secara umum, *fintech* juga memberikan kontribusi pada pengembangan UMKM dengan memberikan pembiayaan modal usaha kepada para pelaku UMKM. *Fintech* memberikan pengaruh positif signifikan pada kinerja UMKM (Fadilah et al., 2022; Mirdiyantika et al., 2023). Artinya, modal yang diperoleh melalui *fintech* dimanfaatkan oleh pengusaha UMKM untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya.

Teknologi keuangan dan literasi keuangan memberikan pengaruh positif pada inklusi keuangan. Keduanya berkontribusi dalam menciptakan keuangan yang lebih inklusif. Oleh karenanya, untuk mendorong tercapainya inklusi keuangan, maka literasi keuangan serta pemanfaatan teknologi keuangan perlu ditingkatkan (Yuliyanti & Pramesti, 2021).

3. Pemberdayaan

Banyak lembaga keuangan menerapkan inklusi keuangan dengan memberikan akses modal kepada masyarakat miskin disertai dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk menyukseskan program tersebut. Terdapat hubungan timbal balik antara inklusi keuangan dan pemberdayaan. Inklusi keuangan tidak dapat lepas dari pemberdayaan, begitu juga sebaliknya. Inklusi keuangan memberikan jaminan kemudahan akses keuangan kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan sumber pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraannya dan berdaya secara finansial. Akan tetapi, kemudahan akses keuangan saja juga

tidak serta merta menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama jika kemudahan akses finansial tersebut tidak digunakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif.

Pemberdayaan masyarakat pada awalnya dipopulerkan oleh organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya memampukan dan memperkuat masyarakat agar dapat memperbaiki keadaannya sendiri (S. Yunus et al., 2017). Tujuannya adalah untuk mereduksi tingkat kemiskinan dengan cara meningkatkan kesadaran mereka akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengoptimalkan potensi tersebut ke dalam bentuk tindakan konkrit (Zubaedi, 2013).

Di Indonesia, integrasi pemberdayaan masyarakat dan inklusi keuangan sudah lama digunakan dalam program-program pengentasan kemiskinan, khususnya pada program-program pemberdayaan ekonomi. Pendekatan ini pada awalnya banyak dipakai oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan modal usaha. LSM menjadi perantara yang memfasilitasi pihak yang mempunyai dana dengan masyarakat peminjam yang kebanyakan adalah rumah tangga berpendapatan rendah dan usaha mikro. Ada beberapa karakteristik umum dari intervensi LSM. Pertama, menekankan pada komunitas sasaran untuk membentuk sebuah organisasi/kelompok. Kedua, menekankan menabung terlebih dahulu (Srinivas, 2022). Akumulasi tabungan yang dikumpulkan dapat menjadi sumber dana potensial untuk disalurkan ke dalam pembiayaan.

Pendekatan ini kemudian juga dipakai dalam program-program pemberdayaan ekonomi pemerintah.

Salah satunya adalah kegiatan simpan-pinjam pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Program ini membentuk kelompok simpan-pinjam yang kemudian diberikan bantuan permodalan dengan sistem tanggung renteng di antara para anggota (Qodriyati & Fakhruddin, 2016). Selain itu, kelompok SPP juga diberikan pembinaan dan pelatihan. Praktiknya kurang lebih sama dengan yang diterapkan oleh banyak koperasi simpan pinjam hari ini. Oleh karena itu, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dana bergulir ini ataupun *credit union* yang dibentuk LSM jika ingin mengurus legalitasnya maka koperasi adalah bentuk yang paling cocok.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga keuangan mikro inklusif yang berkembang hari ini. KSPPS salah satu bentuk koperasi yang bergerak pada jasa simpan-pinjam dengan menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya. Inklusi keuangan pada layanan keuangan yang diberikan KSPPS maempermudah akses masyarakat dalam menadapatkan modal usaha, terutama untuk pelaku UMKM. Selain modal usaha, UMKM juga diberikan pelatihan dan pendampingan usaha serta literasi keuangan sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja usaha UMKM (Muslimin et al., 2021) serta menjamin keberlanjutannya.

Belakangan, integrasi inklusi keuangan dan pemberdayaan juga dilakukan oleh lembaga keuangan seperti perbankan. Salah satunya adalah BTPN Syariah melalui produk Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok. Produk ini menyasar perempuan pra sejahtera yang memiliki usaha produktif. Sistem pembiayaan yang diterapkan BTPN Syariah berbasis kelompok yang disebut sebagai sentra produktif. Selain memberikan pembiayaan modal, BTPN Syariah meningkatkan kapasitas anggota

kelompok melalui pelatihan dan pendampingan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha kelompok (Dewi et al., 2023).

Selain itu, inklusi keuangan dan pemberdayaan masyarakat juga dilakukan oleh lembaga keuangan sosial keagamaan seperti BMT dan Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan produk pembiayaan *qardhul hasan*, melakukan pemberdayaan ekonomi melalui KUMPI dan HALMI, dan memberikan pelayanan jasa keuangan yang murah, mudah, dan berkualitas (Purba et al., 2022). Sementara itu, BMT memiliki keunikan tersendiri. Selain mengelola dana komersial, BMT juga mengelola dana sosial berupa zakat, sedekah, infak, serta wakaf. Sehingga dalam operasionalnya, BMT seperti koperasi dalam mengelola bisnisnya serta seperti lembaga amal zakat dalam mengelola dana sosialnya. Penerapan inklusi keuangan pada BMT dapat dilihat dari peran BMT sebagai lembaga sosial ekonomi. Dalam konsepnya, BMT lebih memfokuskan diri untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat menengah ke bawah hingga masyarakat miskin (Farida & Arifin, 2022).

Berdasarkan paparan di atas, setidaknya, model pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Pembentukan dan pengorganisasian kelompok.
Pembentukan serta pengorganisasian kelompok merupakan langkah penting dalam pemberdayaan masyarakat. Setelah kelompok terbentuk, maka perlu disusun struktur organisasi kelompok tersebut serta aturan main yang disepakati bersama guna mencapai tujuan kelompok.
- 2) Pembinaan kelompok
Setelah organisasi kelompok dibentuk, hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah pembinaan kelompok melalui pelatihan atau pertemuan rutin. Kegiatan ini bertujuan agar pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola usahanya mengalami peningkatan. Selain pengetahuan dan keterampilan, pembinaan juga dapat dilakukan untuk membangun kesadaran dan meningkatkan mentalitas anggota kelompok agar dapat menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya serta berkomitmen dalam menjalankan kewajibannya sebagai anggota kelompok.
- 3) Pemberian modal usaha
Pemberian modal usaha adalah bagian penting dalam program pemberdayaan ekonomi. Dengan modal tersebut, anggota dapat membuat usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah dimiliki guna meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan anggota. Hal ini bertujuan untuk mendorong agar anggota berdaya secara ekonomi.
- 4) Pendampingan kelompok
Pendampingan dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan rutin atau kunjungan lapangan ke pelaku usaha. Pada tahapan ini lembaga keuangan dapat mengevaluasi usaha yang dibiayai sekaligus dapat memberikan solusi kepada pelaku usaha terkait persoalan-persoalan yang dihadapi dalam menjalankan usahanya, termasuk juga memberikan saran-saran untuk kemajuan usaha tersebut di masa depan.
- 5) Mekanisme tanggung renteng sebagai jaminan sosial
Menurut Indriani, tanggung renteng merupakan elemen terpenting dalam pembiayaan berbasis kelompok. Mekanisme tanggung renteng menggeser jaminan fisik dalam

bentuk barang menjadi jaminan sosial. Jaringan sosial yang kuat dan interaksi yang intensif menciptakan kepercayaan dan keyakinan di antara anggota kelompok. Hal ini biasanya terbentuk dari transaksi berulang dan interaksi di dalam kelompok. Pertimbangan norma-norma timbal balik (*reprocity*) dan loyalitas yang menjadi dasar transaksi membangun reputasi dan kredibilitas (Indriani et al., 2020).

KESIMPULAN

Inklusi keuangan terbukti dapat mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan UMKM. Dengan mempermudah akses masyarakat kurang mampu terhadap modal usaha, membuka kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, inklusi keuangan juga harus didukung dengan literasi keuangan, teknologi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat. Literasi keuangan berkontribusi dalam memberikan informasi kepada pelaku UMKM terkait produk-produk keuangan serta meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangan. Teknologi keuangan memberikan kemudahan akses kepada pelaku UMKM dalam mendapatkan akses layanan keuangan. Di sisi lain, pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan mikro berpengaruh terhadap keberlanjutan UMKM

Penelitian ini fokus melihat pada hubungan antara inklusi keuangan dan pertumbuhan UMKM serta faktor yang berkaitan dengan itu yang didapat melalui google scholar. Dalam penelitian ini, penulis menemukan 3 faktor, yaitu literasi keuangan, teknologi keuangan dan pemberdayaan. Penelitian berikutnya dapat menambahkan *platform* pencarian

lain untuk memperluas pencarian dan menemukan faktor lain yang luput dari pengamatan peneliti.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adriani, D., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Inklusi Keuangan Dalam Hubungannya Dengan Pertumbuhan Umkm Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(12), 6420–6444. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i12.p02>
- Ainiyah, F., & Yuliana, I. (2022). Pengaruh Penggunaan Fintech dan Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(3), 1005–1018. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>
- Akyuwen, R., & Waskito, J. (2018). *Memahami Inklusi Keuangan*. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Anisyah, E. N., Pinem, D., & Hidayati, S. (2021). Pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan dan financial technology terhadap perilaku keuangan pelaku UMKM di Kecamatan Sekupang. *Management and Business Review*, 5(2), 310–324. <https://doi.org/10.21067/mbr.v5i2.6083>
- Anwar, K., & Amri. (2017). Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap PDB Indonesia. *JIM: Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, 2(3), 454–462.
- Ardyanfitri, H. (2023). Inklusi Keuangan sebagai Mediasi Financial Technology dalam Meningkatkan

- Kinerja Keuangan UMKM di Pasuruan. *Jurnal MANOVA*, 6(2), 100–114.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/manova.v6i2>
- Bank Indonesia. (2014). *Booklet Keuangan Inklusif*.
- Dewi, I. B. C., Oktafia, R., & Nisa, F. L. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada BTPN Syariah Untuk Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Nasabah Perempuan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 6932–6944.
<http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>
- Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo. (n.d.). *Sejarah dan Latar Belakang Koperasi*. Retrieved November 23, 2023, from <https://koperasi.kulonprogokab.go.id>
- Fadilah, I., Rahman, S., & Anwar, M. (2022). Analisis pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Financial Technology terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bandung. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1347–1354.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i3.2419>
- Farida, N., & Arifin, M. (2022). Program Inklusi Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (BMT). *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 124–134.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/5857%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/download/5857/3664>
- Febriana, S. N., & Sulhan, M. (2021). Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM pada masa Pandemi Covid-19 (studi kasus pada UMKM Kabupaten Malang. *Competitive*, 16(2), 59–69.
<https://doi.org/10.36618/competitive.v16i2.1287>
- Holle, M. H. (2020). Inklusi Keuangan; Solusi Pengentasan Kemiskinan Guna Daya Saing Perekonomian Bangsa. *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business*, 01(02), 163–176.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33477/eksy.v1i02.1257>
- Idawati, I. A. A., & Pratama, I. G. S. (2023). Pengaruh inklusi keuangan dan Literasi keuangan terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 7(2), 205–213.
<https://doi.org/10.37673/jmb.v2i1.305>
- Indriani, E., Hartawan, & Wulandari, A. (2020). *Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish.
- Kerthayasa, I. W., & Darmayanti, N. P. A. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan Di Desa Pengotan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 12(2), 137.
<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2023.v12.i02.p02>
- Kusuma, I. N. P. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan melalui Financial Technology pada UMKM di Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(5), 247–252.
- Laili, N. Y., & Kusumaningtias, R. (2020). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboy). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 436–443.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1>

- Listiani, R., Miolda, P. R., Rahma, U., & Setiyawati, M. E. (2022). Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan UMKM Masyarakat. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(4), 620–627. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jkt.v3i4.9112>
- Maharani, S., & Cipta, W. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja Usaha Mikro di Desa Bakti Seraga Kecamatan Buleleng. *Prospek: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(3), 306–3015.
- Mirdiyantika, A., Indriasari, I., & Meiriyanti, R. (2023). Pengaruhi Literasi Keuangan , Inklusi Keuangan dan Financial Technology terhadap peningkatan Kinerja Umkm Di Kecamatan Bulakamba. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 30–47.
- Muslimin, A., Ashari, F., & Aji, D. K. (2021). Inklusi Keuangan Syariah dan Pemberdayaan UMKM Berkelanjutan (Studi pada KSPPS BMT Artha Buana Metro) Ahmad. *Bulletin of Community Engagement*, 1(2), 127–134.
- Mustofa, M. (2022). Literasi Keuangan Syariah Dan Perilaku Menabung Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 18(2), 183–191. <https://doi.org/10.21831/jep.v18i2.49299>
- Nabila, F., & Rizki, Z. (2018). Analisis Kebijakan Inklusi Keuangan Di Indonesia. *JIM: Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, 3(2), 193–203.
- Nainggolan, E. P. (2023). *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen Peran Mediasi Inklusi Keuangan pada Literasi Keuangan dan Kinerja UMKM di Kabupaten Deli Serdang. Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1).
- Oanh, T. T. K., Van, L. T. T., & Dinh, L. Q. (2023). Relationship between financial inclusion, monetary policy and financial stability: An analysis in high financial development and low financial development countries. *Heliyon*, 9(6), e16647. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16647>
- OJK. (2022a). *Infografis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022*. <https://ojk.go.id>
- OJK. (2022b). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*. www.ojk.go.id
- OJK. (2023). *Financial Technology - P2P Lending*. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>
- Purba, I. A., Samsuri, A., & Fawa'id, M. W. (2022). Peran Bank Wakaf Mikro Lirboyo dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pelaku UMKM Kediri Perspektif Kesejahteraan Islam. *JoIE: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 34–58. www.aging-us.com
- Qodriyati, T. 'Ulya, & Fakhruddin. (2016). Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Dalam Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa Kemloko Kabupaten Grobogan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1(1), 41–48.
- Rafsanjani, H. (2017). Peran Koperasi Wanita dalam Membangun Keuangan Inklusif Syariah (Studi

- Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Majelis Taklim Aisyiyah “Sinar Sakinah Mandiri”). *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 2(2), 19–40.
- Sanistasya, P. A., Raharjo, K., & Iqbal, M. (2019). The Effect of Financial Literacy and Financial Inclusion on Small Enterprises Performance in East Kalimantan. *Jurnal Economia*, 15(1), 48–59.
<https://doi.org/10.21831/economia.v15i1.23192>
- Sharma, A., Das, N., & Singh, S. P. (2023). Causal association of entrepreneurship ecosystem and financial inclusion. *Heliyon*, 9(3), e14596.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14596>
- Srinivas, H. (2022). *Microcredit in Developing Countries: The Facilitative Roles of NGOs*.
<https://www.gdrc.org/icm/microcredit-ngos.html>
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susilawati, E., & Puryandani, S. (2020). Pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan struktur modal UMKM dengan inklusi keuangan sebagai variabel pemoderasi. *Majalah Ilmiah Solusi*, 18(2), 41–70.
- Winda Yanti, Syamsul, & Siti Zuhroh. (2022). Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap Keberlangsungan Usaha Kuliner di Kecamatan Palu Barat. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(8), 515–525.
<https://doi.org/10.56338/jks.v5i8.2700>
- Yuliyanti, P., & Pramesti, D. A. (2021). Tercapainya Inklusi Keuangan Mampukah Dengan Literasi Keuangan Dan Financial Technology? *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 29(2), 57–70.
<https://doi.org/10.32477/jkb.v29i2.292>
- Yunus, M. H., Mahfudnurnajamuddin, Semmaila, B., & Dewi, R. (2022). Pengaruh Risiko Bisnis, Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan dan Keberlangsungan Usaha pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Palopo. *Journal of Management Science (JMS)*, 3(2), 168–199.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33096/jms.v3i2.1088>
- Yunus, S., Suadi, & Fadli. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Bandar Publishing.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana & Praktik*. Kencana.